

ABSTRACT

Sherina Sihite, 2024, ***THE IMPLEMENTATION OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES' MANDATE TOWARDS ROHINGYA REFUGEES IN INDONESIA***. Supervised by Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., and Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.

Indonesia serves as a frequent transit point for refugees, including Rohingya, seeking to reach their intended destinations. The Rohingya presence in Indonesia spans 15 years, with UNHCR recognizing the country as a significant arrival point for this group between 2009 and 2023. However, on December 27, 2023, a surge of Rohingya refugees in Aceh province sparked unrest among local residents, leading to rejection and expulsion of the refugees by some. This study examined the legal implications of the United Nations High Commissioner for Refugees failing to fulfill its mandate and the consequences of such inaction. Utilizing a normative legal research method, this study drew upon legal literature, instruments, and expert opinions in international law. Findings indicated that Indonesia's non-signatory status to the 1951 Refugee Convention poses a significant obstacle to the effective implementation of UNHCR's mandate. This legal standing directly impacts the fulfillment of Rohingya refugees' rights in Indonesia. This study recommends that UNHCR employ its durable solutions framework, encompassing repatriation to the country of origin, resettlement in the first country of asylum, or resettlement in a third country. This approach is crucial to address the current situation, which undermines legal principles of justice, legal certainty, and legal benefit for both the refugees and Indonesian citizens. A balanced approach is essential to ensure the protection of refugee rights.

Keywords: *Mandate Implementation, Rohingya Refugees, UNHCR*

ABSTRAK

Sherina Sihite, 2024, **PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISIONER TINGGI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TERHADAP PENGUNGGI ROHINGYA DI INDONESIA**. Dibimbing oleh: Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., dan Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.,

Indonesia salah satu negara yang sering dikunjungi para pengungsi sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan, salah satunya etnis Rohingya. Keberadaan pengungsi Rohingya terhitung sudah 15 tahun lamanya yang kini telah ditetapkan oleh *UNHCR* sebagai tempat kedatangan pengungsi Rohingya dalam jumlah besar selama periode tahun 2009 hingga tahun 2023, yang pada akhirnya di salah satu wilayah Provinsi Aceh pada tahun 2023 terjadinya fenomena yang menumpuknya pengungsi Rohingya sehingga menyebabkan keresahan bagi warga sekitar dengan disertai penolakan dan pengusiran terhadap pengungsi Rohingya yang dilakukan sebagian warga Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Pengungsi yang tidak melaksanakan kewenangannya serta mengetahui akibat tidak melaksanakan kewenangannya. Metode penelitian menggunakan metode hukum normatif yang menggunakan pijakan hukum berupa studi kepustakaan, instrumen hukum, serta pendapat ahli hukum internasional. Hasil penelitian terdapat Indonesia bukan peserta Konvensi 1951 menjadi alasan adanya hambatan sehingga pelaksanaan kewenangan *UNHCR* tidak berjalan dengan baik, hal ini sangat menyangkut dengan aspek hukum yang dimiliki Indonesia, maka akibatnya tidak sepenuhnya hak-hak para pengungsi rohingya dipenuhi. Saran dari penelitian ini ada sebaiknya *UNHCR* menggunakan solusi permanennya yang dinamakan *durable solution* yang memuat pengungsi dikembalikan kenegara asal, dimukimkan ke negara pemberi suaka pertama, dan dimukimkan di negara ketiga. Karena hal ini sudah tidak bisa dibiarkan mengingat juga tidak memenuhi penegakan hukumnya ialah tidak adanya keadilan, kepastian hukum bahkan kemanfaatan hukum bagi pengungsi maupun warga negara Indonesia agar hak-hak pengungsi bisa berjalan dengan seimbang.

Kata Kunci: Mandat *UNHCR*, Pengungsi Rohingya, Pelaksanaan Kewenangan